

IMPLEMENTASI PROGRAM JAMINAN KESEHATAN GRATIS (BPJS) DI PUSKESMAS MAMASA KABUPATEN MAMASA

Reimond¹, Abdul Khalik*¹, Budiman Imran¹

¹Ilmu Pemerintahan, Fisip, Universitas Muhammadiyah Buton

Email: khalikmandar@gmail.com

ABSTRACT

This research is a qualitative research with a descriptive approach which aims to determine the implementation of the Free Health Insurance Program (BPJS) at the Mamasa Health Center, Mamasa Regency. The results show the characteristics of implementing agents, namely that BPJS Cards are immediately distributed to all people who receive the BPJS program evenly, the attitude/tendency of the implementers, in terms of bureaucratic appointments, has been running and there needs to be more stringent screening, communication between organizations and implementing activities, that it is necessary to conduct better socialization, for example by conducting counseling and installing banners so that information about the free health insurance program (BPJS) can reach remote villages, the economic, social and political environment, the involvement of political elements really needs to be eliminated because this program is a free health insurance program (BPJS) which is a government program that aims to provide equitable distribution of health services to the community.

Keywords: Implementation, Free Health Insurance (BPJS).

ABSTRAK

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang bertujuan untuk mengetahui Implementasi Program Jaminan Kesehatan Gratis (BPJS) di Puskesmas Mamasa Kabupaten Mamasa. Hasil menunjukkan Karakteristik agen pelaksana, yaitu agar Kartu BPJS segera dibagikan kepada seluruh masyarakat yang mendapatkan program BPJS secara merata, Sikap/Kecenderungan para pelaksana, dari segi pengangkatan birokrasi sudah berjalan dan perlu adanya penyaringan yang lebih ketat lagi, Komunikasi antarorganisasi dan aktivitas pelaksana, bahwa perlu adanya melakukan sosialisasi yang lebih baik lagi, misalnya dengan melakukan penyuluhan dan pemasangan spanduk sehingga informasi tentang program Jaminan kesehatan gratis (BPJS) bisa sampai ke pelosok pelosok desa, Lingkungan Ekonomi, sosial dan Politik, keterlibatan unsur unsur politik memang perlu

ditiadakan karena program ini adalah program jaminan kesehatan gratis (BPJS) yang merupakan program pemerintah yang bertujuan untuk memberikan pemerataan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Kata Kunci : Implementasi, Jaminan Kesehatan Gratis (BPJS).

PENDAHULUAN

Undang-undang dasar menetapkan, bahwa negara berkewajiban melayani seluruh warga negara dan penduduknya dalam memenuhi kebutuhan dasar. Semua kepentingan publik harus di jalankan oleh pemerintah desa sebagai regulator terutama diberbagai sektor pelayanan terkhusus yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik. Kewarganegaraan dan kebutuhan dasar masyarakat singkatnya semua hal dalam kehidupan banyak orang pastinya membutuhkan pelayanan. (Agustino, 2018)

Pemerintah adalah badan kedaulatan dalam hal ini adalah pengurus pemerintah terhadap pemerintah, menjamin pengelolaan kepentingan umum, hal ini dilakukan oleh gubernur pemerintah negara yang memiliki kewenangan. (Anselm, Corbit, dan Juliet, 2017)

Pembangunan kesehatan nasional adalah serangkaian kegiatan yang tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan, memulihkan, dan memelihara kesehatan yang baik. Oleh karena itu, untuk meningkatkan transparansi sistem keuangan, pembiayaan kesehatan perlu ditingkatkan, dan perbaikan infrastruktur, infrastruktur kesehatan, kualitas sumber daya, dan kualitas layanan juga harus diperhatikan. (Syaukani, 2014)

Tak heran jika industri dibidang medis harus selalu memperhatikan pemberian pelayanan kesehatan terbaik kepada masyarakat. Tentunya pelayanan medis yang dimaksud adalah pelayanan yang cepat, tepat, murah dan bersahabat (friendly), karena dapat berhasil dalam pembangunannya jika negara ini di dukung oleh masyarakat yang sehat jasmani dan rohani.

Berdasarkan pengakuan tersebut, rumah sakit dan pusat kesehatan di Indonesia berupaya dengan menyediakan staf medis yang memenuhi syarat untuk struktur pendukung lainnya seperti tim medis, ruang makan, ruang tunggu, dan apotek.

Konstitusi nasional yaitu UUD 1945, khususnya pasal 28 (3) dan 34 (2), mendefinisikan “Jaminan sosial sebagai hak semua warga negara” dan “Negara sedang membangun sistem jaminan sosial”. Memberdayakan yang lemah dan yang lemah untuk semua. tidak bisa”.

Aturan Negara khususnya UUD 1945, khususnya Pasal 28 (3) dan 34 (2), mendefinisikan Jaminan sosial adalah hak semua warga negara dan negara mengembangkan sistem jaminan sosial untuk semua yang rentan dan memberdayakan mereka yang kurang mampu". Misalnya pergeseran dari pemikiran tradisional yang berisiko ke pemikiran modern. Covid-19 merupakan salah satu masalah industri kesehatan saat ini, dan Covid-19 yang mempengaruhi status kesehatan ada di seluruh wilayah Indonesia, termasuk

Kabupaten Mamasa, Pendekatan pemberian layanan saat ini adalah pandemi, Perubahan risiko yang beroperasi dalam konteks - harus disesuaikan untuk analisis manfaat. Di daerah di mana infeksi COVID-19 belum terjadi, kegiatan khusus mungkin perlu direncanakan. Menyesuaikan apakah rejimen manajemen alternatif dapat diterapkan dengan aman, atau menghentikannya sementara di lokasi di mana infeksi COVID-19 biasa terjadi. Jika perlu mekanisme pemberian layanan lain seperti aplikasi seluler, telemedicine, dan platform digital lainnya harus digunakan untuk membatasi kunjungan langsung. Penyesuaian khusus akan tergantung pada situasi, termasuk beban penyakit di wilayah tersebut, skenario infeksi COVID-19, dan kemampuan wilayah tersebut untuk memberikan layanan dengan aman dan efektif. Sebuah penyakit ditandai dengan adanya masalah kesehatan pada tubuh manusia seperti perasaan kebingungan jasmani, pikiran serta psikologis.

Pembentukan Dana Jaminan Kesehatan Nasional (BPJS). Adanya BPJS Kesehatan ini bisa dibayar untuk mendapatkan layanan umum dan bagus, serta pelanggan membayar biaya lainnya yang diluar daritanggung BPJS, sehingga masyarakat terutama masyarakat miskin dan kurang mampu akan kesulitan untuk membayar biaya pengobatannya dan Biaya tersebut sudah termasuk biaya pengobatan di Puskesmas, khususnya biaya transportasi ke rumah sakit. Kebijakan Kesehatan BPJS di Kabupaten Mamasa merupakan bagian dari visi dan misi Gubernur Sulawesi Barat, meningkatkan kualitas pelayanan untuk mewujudkan hak dasar masyarakat. (Gulo. W, 2014)

Realitas penyelenggaraan pelayanan kesehatan BPJS terlihat jelas dengan adanya perbedaan pemakaian kartu layanan dari pemakai BPJS serta pengguna layanan medis lainnya misalnya masyarakat yang tidak memakai kartu BPJS tidak bisa mendapatkan pelayanan yang gratis harus membayar untuk mendapatkan pelayanan itu karena memiliki riwayat pelayanan yang panjang dibandingkan dengan pengguna layanan medis lainnya. Selain kurangnya profesionalisme agen, ada agen yang memberikan informasi yang tidak ramah, ruang tunggu dengan peralatan yang minim, dan obat-obatan mahal yang menghalangi orang untuk datang ke Puskesmas. Sehingga semua orang mau dan senang pergi ke Mantri dan Dukun untuk berobat. (Kadir, 2012)

Pemberian pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat telah diterapkan pada 17 puskesmas dan rumah sakit umum daerah Mamasa. Sementara itu, pasien perlu membawa kartu Jamkesmas atau BPJS untuk menikmati layanan yang sudah diprogramkan oleh pemerintah terutama masyarakat yang kurang mampu dan harus memiliki kedua kartu tersebut, adapun persyaratan yang harus di penuhi yaitu mendaftarkan diri di program BPJS dengan syarat fotocopy KTP dan Kartu Keluarga.

Perilaku masyarakat merupakan bagian utama dari pencegahan dalam

melakukan kesalahan. Kebiasaan warga seolah-olah mulai menjauhi pedoman hidup sehat, mengubah kebiasaan makan dimana makanan cepat saji saat ini menjadi bahan makanan sehari-hari dan jumlah makanan yang beredar telah menggunakan bahan pengawet (bahan kimia) berubah. (Salim, Agus 2016)

Perubahan dan globalisasi ekonomi ini akan meningkatkan biaya pelayanan kesehatan masyarakat seiring dengan meningkatnya jumlah penyakit dan jenis penyakit yang diderita masyarakat. Dan masyarakat belum bisa menghadapinya. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah menetapkan bagaimana pemerintah menetapkan kewajiban memberikan jaminan sosial kepada seluruh rakyat Indonesia dalam bentuk jaminan seperti biaya pengobatan, tunjangan hari tua, dll. Pada tahun 2004, Undang-Undang Nomor 40 diundangkan.

Dari sisi peningkatan pelayanan masyarakat, 17 Puskesmas Pemkab Mamasa meliputi 17 sub bagian, beberapa di antaranya menyediakan unit pelayanan rawat inap dan unit gawat darurat. Artinya jika masyarakat belum sepenuhnya menyadari adanya program dan prosedur kesehatan gratis yang ada di masyarakat, yaitu tidak tersedia, maka tujuan dari program ini dapat segera tercapai. Selain kurangnya sosialisasi dan pendidikan kesehatan kepada petugas setempat, permasalahan lainnya yakni tidak adanya pemahaman warga tentang ola hidup sehat. Untuk itu pentingnya karya ilmiah ini dalam mengetahui bagaimana pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Gratis (BPJS) di Puskesmas mamasa di Kabupaten Mamasa. Sehingga penulis tertarik untuk mengangkat judul ” Implementasi Program Jaminan Kesehatan Gratis (BPJS) di Puskesmas Mamasa Kabupaten Mamasa”.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam risalah ilmiah ini adalah penelitian kualitatif. Artinya, melakukan wawancara mendalam berdasarkan apa yang terjadi ketika peneliti melakukan penelitian, mengumpulkan data, menganalisisnya, menggunakan teori untuk membandingkan dengan kenyataan di lapangan dan menarik kesimpulan. Survei dilakukan di Puskesmas Mamasa Kabupaten Mamasa selama dua bulan dari Februari hingga April 2021 (Moleong, 2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut teori Edward Dasar hukum pada Menurut teori Edward III landasan hukum program kesehatan gratis sebagai kebijakan yang di terapkan oleh Pemerintah Negara Sulawesi Barat, Pada dasarnya mempunyai pedoman ke dalam dua peraturan undang-undang yaitu, peraturan perundang-undangan Tahun 2014 tentang pedoman praktik bebas saat ini sebagaimana di atur dalam peraturan

gubernur sulawesi barat Nomor 13 tentang program kesehatan sulawesi barat dan peraturan daerah mamasa nomor 16 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan pemeriksaan gratis.

3.1. Implementasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Gratis (BPJS) Pada Wilayah Kerja Puskesmas Mamasa Kecamatan Mamasa

Lokasi Puskesmas Mamasa, sebagai salah satu lokomotif Kabupaten Mamasa dengan memiliki 10 Desa yang seharusnya menjadi persoalan tersendiri. Berdasarkan pernyataan ini dapat di lihat dengan hasil wawancara bersama dengan Bapak Yusuf selaku Kepala Puskesmas Mamasa dalam wawancara beliau mengatakan bahwa:

“...Kami harap juga agar dalam pelayanan ini dapat terlaksana sesuai dengan apa yang di harapkan bersama”. (wawancara 22 maret 2021).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat di kemukakan bahwa dalam proses pelayanan mengenai kartu BPJS puskesmas Mamasa sudah sangat baik dan dalam pelaksanaan pelayanannya pun sangat maskimal. Dimana pada pelayanan ini dilakukan oleh parah perawat yang ahli dalam melakukan pelayanan sehingga dapat terlaksanan dengan baik dan maksimal. Pernyataan ini muncul dari hasil wawancara dengan direktur Puskesmas Mamasa, dalam wawancara beliau mengatakan bahwa:

“...Dengan meningkatnya implementasi jaminan kesehatan pun susah sangat meningkat dan dapat menjadi cakupan kepada masyarakat” (wawancara 22 maret 2021).

Dalam hal ini penulis berkesimpulan, ya, sebelum adanya program pemerintah, masyarakat berobat ke rumah sakit dan berobat jalan gratis. Mengingat daerah mamasa yang merupakan wilayah kerja mamasa medical center terletak di daerah terpencil, dan daerah tersebut terbatas sehingga membuat ragu untuk pergi ke puskesmas dalam melakukan perobatan. sebagai mana yang di ungkapkan oleh staf kesehatan dalam wawancara beliau mengatakan bahwa:

“sebelum adanya BPJS, mengingat cakupan masyarakat yang berkunjung ke puskesmas untuk perobatan tidak dapat di sangkal lebih berpihak pada pengobatan tradisional” (wawancara 22 maret 2021).

Peningkatan cakupan pengunjung puskesmas mamasa yang salah satu faktor yang mempengaruhi oleh biaya pengobatan telah membebaskan masyarakat dari apa yang harus di tanggung sebelumnya dan itu tidak murah kecuali untuk beban mobilitas yang cukup banyak. Sebagaimana dikatakan pasien BPJS dalam wawancara beliau mengatakan bahwa:

“...sekarang saya pakai kartu BPJS gratis dalam melakukan perobatan di sini”. (wawancara 22 maret 2021).

Oleh karena itu, kesimpulan dalam hal ini adalah bahwa tujuan BPJS untuk meningkatkan cakupan masyarakat dengan menerima pelayanan kesehatan yang telah tercapai.

Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan daerah. Sesuai dengan peraturan Gubernur Nomor 13 pasal 5 Tahun 2014 tentang prinsip pengobatan gratis, dilaksanakan dengan prinsip sebagai berikut:

- 1) Transparansi
- 2) Akuntabilitas publik
- 3) Team work
- 4) Inovatif
- 5) Cepat, cermat, dan akurat
- 6) Pelayanan terstruktur dan berjenjang
- 7) Kendali mutu dan kendali biaya

Seperti yang di ungkapkan oleh dinas kesehatan dalam wawancara beliau mengatakan bahwa:

“...BPJS mengalami peningkatan kualitas layanan di bandingkan sebelumnya. misalnya, jika seorang di rujuk ke rumah sakit daerah, mereka menggunakan ambulans yang di sediakan oleh puskesmas, tetapi sebelumnya BPJS harus meminta keluarga pasien untuk datang kerumah sakit dengan membawa mobil sendiri...”.

Peningkatan keunggulan layanan kesehatan public bisa dilihat dengan tersedianya sarana yang di sediakan puskesmas, antara lain ambulans masyarakat gratis yang diberikan kepada masyarakat rumah sakit umum mamasa dan kondo sapata.

- 1) Komitmen pimpinan politik

Memperkuat pemerataan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Sasaran program BPJS ini adalah seluruh penduduk sulawesi barat yang beridentitas. (Kartu Peserta, KTP, Kartu Keluarga), tidak ada jaminan kesehatan lainnya (jamkesmas, BPJS/PNS) Sosial, jamsostek, Asbari, akses komersial dan lain-lain. sebagaimana yang di ungkapkan oleh staf dalam wawancara beliau mengatakan bahwa:

“...pasien yang memenuhi syarat atau tidak kompeten akan menerima layanan yang sama”. (wawancara 22 maret 2021).

Kehadiran jaminan kesehatan masyarakat memberikan pemerataan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan pemerataan pelayanan kesehatan. ini

nyata dengan wawancara yang dilakukan bersama dengan seorang masyarakat dalam wawancara beliau mengatakan bahwa:

“...JKN merupakan program BPJS kesehatan yang menggunakan sistem asuransi”. (wawancara 22 maret 2021).

Pernyataan yang kurang lebih sama yang di ungkapkan oleh pasien dalam wawancara beliau mengatakan bahwa:

“...JKN adalah program pemerintah dalam bentuk KIS (kartu indonesia sehat)”. (wawancara 22 maret 2021).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan bersama dengan ibu darmawanti dalam wawancara beliau mengatakan bahwa:

“...JKN adalah program pelayanan kesehatan pemerintah dalam bentuk BPJS kesehatan, dan sistemnya menggunakan sistem asuransi. Perbedaan keduanya adalah BPJS adalah penyelenggara program dan sedangkan JKN adalah nama program BPJS”. (wawancara 22 maret 2021).

Oleh karena itu, dilihat dari hasil wawancara sebelumnya bahwa BPJS bermanfaat bagi pasien dan masyarakat di Kabupaten Mamasa, penulis menyimpulkan bahwa BPJS bermanfaat untuk kebutuhan kesehatan masyarakat.

2) Kemampuan organisasi.

Asuransi keseluruhan di berlakukan pada tahun 2014 dengan peraturan gubernur nomor 13 dan diprogramkan oleh pemerintah negara Indonesia tentang pedoman pelaksanaan Program Pelayanan kesehatan Gratis (BPJS). Sesuai dengan hasil wawancara yang dikemukakan oleh kepala puskesmas dalam wawancara beliau mengatakan bahwa:

“...puskesmas mamasa sangat membantu dalam proses pelayanan gratis utamanya di kartu BPJS dan ini di tangani langsung oleh dokter spesialis”. (wawancara 22 maret 2021).

Lanjut hasil wawancara yang dilakukan bersama dengan staf dinas dalam wawancara beliau mengatakan bahwa:

“...kemampuan sumber daya yang memadai di puskesmas ini sebagai salah satu fasilitas yang sangat besar terhadap kinerja yang dilakukan oleh para dokter”. (wawancara 22 maret 2021).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka dapat dikatakan bahwa adanya kemampuan pelaksanaan pelayanan gratis BPJS yang ada di puskesmas mamasa, maka dapat meruba segala pelayanan mulai dari pelayanan secara pengambilan obat-obatan maupun pelayanan bagi pasien rawat inap. Ini terlihat dengan hasil wawancara bersama dengan salah seorang pasien dalam wawancara beliau mengatakan bahwa:

“...pelayanan sumber daya maka kami selaku masyarakat juga tidak terlalu terbebani dalam proses pelayanan yang ada di puskesmas ini”. (wawancara 22 maret 2021).

Lanjut dengan hasil wawancara yang kurang lebih sama dengan masyarakat lain yang sedang melakukan perobatan dalam wawancara beliau mengatakan bahwa:

“...adanya pelayanan gratis yang dilakukan, kami juga dapat terbantu dan pelayanan pun tidak di pungut biaya sama sekali”. (wawancara 22 maret 2021).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka dapat dikatakan bahwa pelayanan dalam BPJS gratis sudah sangat maksimal dan masyarakat juga merasa sangat terbantu dalam proses pelayanan dan tidak di pungut biaya. Pernyataan di atas nampak terlihat dengan wawancara yang dilakukan bersama dengan sala satu pasien yang berkunjung ke puskesmas mamasa. dalam wawancara beliau mengatakan bahwa:

“iya kami selaku masyarakat sangat terbantu dengan adanya proses pelayanan gratis di puskesmas ini...”(wawancara 22 maret 2021).

Dalam proses pelaksanaan kesehatan gratis sudah bisa di katakan sangat meningkat, dan dengan adanya program jaminan kesehatan tersebut maka masyarakat juga tidak memungut biaya yang besar pada saat mereka melakukan pelayanan. Sebagaimana yang di kemukakan Bapak salmon dalam wawancara beliau mengatakan bahwa:

“kalau dulu itu sebelum adanya pengobatan gratis, kami juga sangat jarang sekali dalam melakukan perobatan mengingat kami tidak punya biaya yang cukup...”(wawancara 22 maret 2021).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka penulis dapat mengemukakan kesimpulan bahwa tujuan dengan adanya kesehatan gratis adalah untuk lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Seperti yang terlihat pada undang-undang peraturan gubernur Tahun 2014, dan di susul oleh peraturan daerah Nomor 16 Tahun 2014. Dalam hal ini instansi yang berwenang dalam hal pelaksanaan kesehatan gratis merupakan organisasi tertentu dalam pelaksanaan yang dilakukan oleh tingkat rumah sakit. Pernyataan ini dapat di lihat dengan hasil wawancara yang dilakukan bersama dengan bapak arif, dalam wawancara beliau mengatakan bahwa:

“Mengenai adanya pelayanan BPJS gratis bagi masyarakat, maka pelayanan kualitas yang di lakukan oleh pihak rumah sakit juga sangat maksimal.”(wawancara 22 maret 2021).

Lanjut dengan wawancara yang dilakukan bersama dengan bapak tokar selaku staf, dalam wawancara beliau mengatakan bahwa:

“...pelayanan gratis di puskesmas mamasa, maka peningkatan kualitas yang ada sudah sangat maksimal dan masyarakat pun sangat terbantu...” (wawancara 22 maret 2021).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dengan adanya peningkatan kualitas mengenai kesehatan gratis maka masyarakat dan sejahtera dan terbantu dengan adanya proses pelayanan gratis yang di lakukan di puskesmas mamasa.

Adanya pelaksanaan kesehatan gratis yang diberikan oleh pemerintah, maka terjadi pelayanan yang sangat baik dan pelayanan juga yang dilakukan oleh perawat semakin meningkat. Seperti yang di maksud dalam peraturan daerah sebagai peraturan perundang-undangan yang sangat penting sebagai pedoman dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah badan administrasi. Selain itu dengan mengacu pada prinsip-prinsip otonomi dan anggota DPRD binaan yang dimana sebuah pertunjukan bukanya langsung mengeluarkan peraturan gubernur hanya karena janji-janji yang menghantui mengenai rencana kesehatan gratis. Pernyataan ini dapat di lihat dengan hasil wawancara bersama dengan ibu damawanti bahwa ::

“...layanan rencana kesehatan gratis, maka kami sebagai rakyat sangat terbantu dan kualitas yang tersedia juga sangat maksimal khususnya dalam peningkatan pelayanan”. (wawancara 22 maret 2021).

Dari hasil wawancara tersebut, dengan adanya peningkatan kualitas pelayanan puskesmas mamasa dapat terlihat dari ketersediaan fasilitas-fasilitas yang sangat mendukung yang ada, sehingga regulasi penyelenggaraan program dapat berjalan sesuai dengan aturan yang sudah di tetapkan oleh pemerintah mengenai pelayanan gratis.

Lanjut dengan hasil wawancara yang dilakukan bersama dengan kepala puskesmas mamasa, dalam wawancara beliau mengatakan bahwa:

“dengan adanya program kesehatan gratis kami juga tidak membedakan pelayanan kepada pasien yang tidak mampu dan pasien yang mampu...” (wawancara 22 maret 2021).

Berdasarkan hasil wawancara di atas. dapat di katakan bahwa adanya jaminan kesehatan gratis yang di terbitkan oleh pemerintah maka terjadi pemerataan dan pemberian pelayanan yang sama dengan masyarakat. Selain itu, untuk melawan hukum dan peran hukum tata usaha negara dengan sifat peraturan dan pelaksanaanya dalam mendukung keadilan dan tujuan di buatnya peraturan adalah untuk endapatkan pelayanan yang sama rata dan tidak membedakan.

3.2. Implementasi Program Jaminan Kesehatan Gratis (BPJS) di Puskesmas Mamasa

Pembentukan Program Jaminan Kesehatan Gratis (BPJS) berdasarkan teori Edward III, yaitu:

3.2.1. Komunikasi

Komunikasi adalah proses dimana satu atau lebih orang, kelompok, organisasi atau komunitas membuat dan menggunakan informasi dan terhubung dengan lingkungan orang lain. Komunikasi biasanya verbal atau verbal dan dapat dipahami di kedua bagian. Salah satu aspek yang perlu diperhatikan adalah adanya komunikasi yang berjalan dengan baik diantara pihak-pihak yang terkait apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan ditransmisikan (dikomunikasikan) kepada kelompok sasaran (target group) dalam hal ini masyarakat (kelompok) dan petugas lapangan harus tepat, akurat, dan konsisten, sehingga akan mengurangi distorsi implementasi dalam upaya pencapaian tujuan kebijakan (Abd. Khalik, 2017). Komunikasi juga adalah suatu proses penyampaian informasi, gagasan, emosi, keahlian, dan lain-lain. Melalui penggunaan simbol-simbol seperti kata-kata, gambar-gambar, dan lain-lain.

Dan kemudian berdasarkan wawancara di Puskesmas Mamasa dengan kepala puskesmas bapak Yusuf mengatakan bahwa:

“Komunikasi yang terjalin berlangsung secara baik karena dalam menjalankan program ini dibutuhkan kerjasama yang baik...”(wawancara 23 maret 2021)

Adapun hasil wawancara di atas kemudian dipertegas oleh ibu Darmawati selaku staf dinas kesehatan bahwa:

“Sejauh ini hubungan antar mitra kerja dibidang kesehatan dalam melaksanakan program bpjs berjalan dengan baik...” (wawancara, 23 maret 2021)

Dari wawancara diatas dapat dilihat kalau komunikasi yang ada di puskesmas mamasa sudah sangat baik. Sesuai dengan wawancara kepala puskesmas mamasa dan staf dinas kesehatan mamasa. Kemudian pandangan masyarakat tentang komunikasi yang ada dapat dilihat dari wawancara dengan salah satu pasien ibu Marnice mengungkapkan bahwa:

“kalau pelayanan di puskesmas ini sangat baik karena mereka sangat ramah pada saat melayani saya...”(wawancara,23 maret 2021).

Hal senada juga di katakan oleh salah seorang masyarakat ibu Serni Furwaty bahwa :

“komunikasi yang ada di puskesmas sangat baik namun kurangnya sosialisasi kepada masyarakat...” (wawancara,23 maret 2021)

Jadi dari hasil wawancara diatas maka penulis menyimpulkan bahwa komunikasi yang ada di puskesmas sudah sangat baik. Dalam pelayanan ini dibutuhkan kerja sama yang baik dan tentunya membutuhkan kemampuan komunikasi yang baik. Maka dari itu penulis menyimpulkan komunikasi yang ada di puskesmas Mamasa sudah sangat baik namun kurangnya sosialisasi membuat

masyarakat di pelosok kurang paham tentang penggunaan BPJS.

3.2.2. Sumber Daya

Dalam pengertian umum, sumber daya di artikan sebagai sesuatu yang dipandang memiliki nilai ekonomi. Dapat juga dikatakan bahwa sumber daya adalah komponen dari ekosistem yang menyediakan barang dan jasa yang bermanfaat bagi kebutuhan manusia. Sumber daya adalah suatu nilai potensi yang dimiliki oleh suatu materi atau unsur tertentu dalam kehidupan.

Berdasarkan Wawancara dengan kepala puskesmas bapak Yusuf mengatakan bahwa :

“Sumber daya yang kami miliki selaku pelaku program BPJS saat ini masih kurang karena terdapatnya jenis ketenagaan seperti dokter spesialis dan lainnya masih cukup kurang...” (wawancara, 23 maret 2021)

Sumber daya yang ada di puskesmas sudah baik berdasarkan wawancara diatas. Adapun menurut dari salah seorang masyarakat tentang sumber daya yang ada di puskesmas dikutip dari wawancara dengan ibu Nelce selaku masyarakat :

“kemampuan sumber daya selaku pelaku program BPJS di puskesmas ini tidak diragukan karena sesuai SOP...” (wawancara, 22 maret 2021)

Jadi berdasarkan wawancara diatas maka penulis menyimpulkan bahwa sumber daya yang ada di puskesmas dalam hal pelayanan sudah bagus. Dapat dilihat dari hasil wawancara dengan empat unsur utama yang ada di kesehatan mamasa. Maka dari itu penulis menyimpulkan bahwa sumber daya yang ada di puskesmas sudah sangat bagus.

3.2.3. Disposisi

Disposisi adalah pendapat seseorang pejabat mengenai urusan yang termuat dalam suatu yang bersifat resmi. disposisi dalam hal ini adalah pengetahuan orang lain tentang BPJS JKN.

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Puskesmas Mamasa, Yusuf mengungkapkan bahwa :

“BPJS adalah singkatan dari badan penyelenggara jaminan social. bpjs ini adalah perusahaan asuransi jaminan social dan JKN merupakan program pelayanan kesehatan... yang sistemnya menggunakan sistem asuransi ...penyelenggaraan kinerjanya diawasi oleh djsn (dewan jaminan social nasional)”(wawancara 23 maret 2021)

Berdasarkan wawancara diatas maka penulis mendapat sebuah kesimpulan yaitu orang-orang paham betul apa itu program BPJS JKN. Meskipun dalam hal sosialisasi sangat kurang karena faktor pandemik di saat ini namun selain itu semua sudah sangat bagus tinggal bagaimana mengembangkan supaya bisa lebih bagus

lagi.

3.2.4. Struktur birokrasi

Pelayanan publik menjadi ujung tombak interaksi antara masyarakat dan pemerintah. Kemampuan birokrasi dapat dinilai salah satunya dengan melihat sejauh mana kualitas pelayanan publik sebagai implementasi kebijakan birokrasi dilapangan, pelayanan publik pun menarik minat tersendiri untuk dipelajari. Adapun tanggapan masyarakat terhadap birokrasi dapat disimpulkan berdasarkan

- Kemudahan mengakses Kartu BPJS
- Lama pengurusan Kartu BPJS
- Tanggapan terhadap waktu yang dibutuhkan
- Panjangnya Antrian
- Kemudahan mengisi formulir dan persyaratan

Berdasarkan wawancara dengan kepala puskesmas bapak Yusuf mengatakan bahwa :

“tentunya kami berupaya untuk memberikan yang terbaik agar pasien mudah dalam mengurus surat-surat mereka...”(wawancara 24 maret 2021)

Adapun hal senada juga dikatakan oleh staf dinas kesehatan oleh ibu Darmawati mengungkapkan bahwa :

“Tujuan BPJS kesehatan adalah untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat secara gratis... Manfaat BPJS kesehatan adalah meringankan beban masyarakat untuk mendapatkan pengobatan dan perawatan” (wawancara 26 maret 2021)

Dari wawancara diatas maka Penulis menyimpulkan struktur birokrasi di puskesmas mamasa sudah sangat baik namun dalam akses online masih kurang karena jaringan yang kurang bagus dan hanya sedikit orang yang paham dalam pelaksanaannya.

Tentang penetapan Program Jaminan Kesehatan Gratis (BPJS) berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan, yaitu:

3.2.5. Faktor pendorong

Salah satu Program Kesehatan Gratis (BPJS) pemerintah adalah Program BPJS yang dari segi pendanaan perlu mendukung masyarakat. Fakta tersebut di pertegas oleh Kepala Seksi Dinas Kesehatan Meirine Handayani beliau mengatakan bahwa :

“Misalnya, Masyarakat diberikan konsultasi gigi gratis, cabut gigi dan distribusi obat-obatan. Sebelum program BPJS dikenakan biaya Rs 26.000,

sekarang gratis” (wawancara, 22 Maret 2021)

Seperti disebutkan sebelumnya, kita dapat menyimpulkan bahwa pendanaan masyarakat (publik) telah terbantu. Misalnya, sebelum program pemerintah dilaksanakan, masyarakat pergi ke Puskesmas dan mengambil pasien primer (obat generik) untuk pasien yang sakit. Dan setelah program BPJS berakhir, mereka yang telah berobat ke Puskesmas bisa menerimanya secara gratis selama jam kerja.

Kawasan Mamasa yang merupakan wilayah kerja Puskesmas Mamasa (Medical Center) banyak terletak di daerah terpencil, tak dipungkiri masyarakat terpaksa dan ragu-ragu untuk pergi ke Puskesmas untuk berobat. Hal ini dipertegas oleh staf Dinas Kesehatan Tenriani beliau mengungkapkan bahwa :

“Sebelum adanya BPJS... tidak dapat dipungkiri banyak masyarakat yang lebih memilih pengobatan tradisional” (wawancara, 22 Maret 2021)

Dengan meningkatnya cakupan pengunjung Puskesmas Mamasa, salah satu faktor yang mempengaruhi biaya pengobatan adalah terbebas dari yang sebelumnya ditanggung oleh masyarakat, biaya yang tidak murah, dan biaya perjalanan yang signifikan, semakin tinggi, serta Kepuasan pasien berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepercayaan pasien (Budiman Imran, 2019).

Oleh karena itu, dalam hal ini kesimpulannya adalah bahwa tujuan BPJS untuk meningkatkan cakupan masyarakat saat menerima pelayanan medis telah tercapai. Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2014 pasal 5 tentang asas pelaksanaan Kesehatan Gratis dilaksanakan berdasarkan asas :

- 1) **Transparansi**
- 2) **Tanggung jawab publik**
- 3) **Kerja sama tim**
- 4) **Kreativitas**
- 5) **Cepat, akurat, tepat**
- 6) **Layanan terstruktur bertingkat**
- 7) **Kontrol kualitas dan manajemen Kontrol biaya.**

Keunggulan pelayanan kesehatan masyarakat lebih lanjut tercermin dari ketersediaan fasilitas yang disediakan oleh tokoh-tokoh, termasuk ambulan gratis yang diantarkan ke Rumah Sakit Mamasa Kondo Sapata.

3.2.6. Faktor Penghambat

Sikap pembuat kebijakan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan. Jika para pelaksana setuju dengan isi kebijakan, mereka akan dengan senang hati mengimplementasikannya, tetapi jika

mereka tidak setuju dengan para pengambil keputusan, akan banyak masalah dalam proses implementasinya.

Temperamen dan sikap para pelaksana akan menjadi kendala nyata bagi implementasi kebijakan yang diinginkan oleh pejabat senior. Mengenai penunjukan badan eksekutif badan administratif tersebut, Pak Yusuf mengatakan dari hasil wawancara dengan direktur Puskesmas Mamasa (Medical Center) yaitu:

“...ikuti proses yang ada dan tetapkan sesuai dengan kemampuannya”
(wawancara, 22 Maret 2021)

Berdasarkan pengamatan penulis di lapangan, pengangkatan staf sudah melalui proses yang wajar dan penempatan staf sesuai dengan kemampuannya.

Komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Gratis (BPJS) di Puskesmas Mamasa. Eksekusi yang efektif terjadi ketika pengambil keputusan sudah tahu apa yang mereka coba lakukan. Jika komunikasi berhasil maka ilmu yang dipelajari akan berhasil dan pelaksanaan program harus dikomunikasikan dengan baik kepada para pemangku kepentingan. Selain itu, kebijakan yang dikomunikasikan harus akurat, akurat dan konsisten. Komunikasi diperlukan bagi pengambil keputusan dan pelaksana program untuk lebih konsisten dalam pelaksanaan setiap program yang berlaku untuk tujuan program.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh salah satu staf dinas kesehatan mamasa, Darmawati beliau mengatakan bahwa :

“Stakeholder melatih penanggung jawab program Puskesmas...”
(wawancara, 23 Maret 2021)

Program Jaminan Kesehatan Gratis (BPJS) Pemerintah terutama bertujuan untuk meringankan beban masyarakat melalui pembiayaan pelayanan kesehatan. Hal terpenting dalam pelaksanaan program ini adalah mengedukasi masyarakat tentang fasilitas kesehatan gratis yang dikelola pemerintah (BPJS).

Namun pada kenyataannya, penulis menyadari bahwa tidak semua orang mengenal jenis jaminan kesehatan gratis (BPJS) ini. Keterlibatan pemangku kepentingan dalam pelaksanaan program ini adalah kunci keberhasilannya. Sosialisasi hanya terjadi di tingkat perangkat jika dikaitkan dengan apa yang ada di lapangan, tetapi kurang lebih untuk masyarakat. Pengetahuan umum tentang adanya jaminan kesehatan gratis ini ketika pemangku kepentingan berobat ke Puskesmas. Hanya mereka yang dirawat di Puskesmas yang mengetahui program ini.

Melihat realita bagaimana mensosialisasikan mereka yang melaksanakan Program Jaminan Kesehatan Gratis (BPJS), penulis sangat banyak berbicara hanya melalui pertemuan orang-orang tertentu, tokoh masyarakat, dan tidak

disiarkan ke publik, saya kira kecil. Hubungi komunitas secara langsung dan pasang pengumuman terkait program. Jaminan Kesehatan Gratis (BPJS). Sarana komunikasi yang sederhana ini menghambat penyampaian pesan yang tepat kepada masyarakat dan, pada akhirnya, pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Gratis (BPJS). Melihat kenyataan di atas, penulis menyimpulkan bahwa proses komunikasi saat ini belum optimal, dan tujuan program belum tersosialisasikan secara memadai dan optimal.

KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan dan pembahasan hasil penelitian, dapat ditarik kesimpulan berikut tentang masalah penelitian yang diajukan:

1. Implementasi Program Kesehatan Gratis sudah cukup sesuai dan optimal di banding yang lalu. Hal ini terlihat dari :
2. Besaran dan tujuan pertanggung jawaban tersebut setelah dipastikan bahwa tujuan dari program jaminan kesehatan gratis (BPJS) adalah yang terpenting dan perbaikan dalam pelayanannya mulai dilakukan dengan benar.
3. Sumber daya, sumber daya tersebut cukup, tetapi dalam hal ini, sumber daya manusia perlu ditingkatkan.
4. Keistimewaan dari agen distribusi adalah Kartu BPJS didistribusikan secara instan ke semua penerima program BPJS secara seragam.
5. Sikap/kecenderungan para ahli terhadap pengangkatan birokrasi telah diambil dan memerlukan seleksi yang lebih cermat.
6. Mengkomunikasikan dan melaksanakan kegiatan antar organisasi, seperti konsultasi dan spanduk, untuk memastikan bahwa informasi tentang Program Jaminan Kesehatan Gratis (BPJS) mencapai desa-desa terpencil.
7. Program ini merupakan program jaminan kesehatan gratis (BPJS), program pemerintah yang mendistribusikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Ini adalah faktor politik dalam lingkungan ekonomi. Kebutuhan untuk menghilangkan kebutuhan sosial dan politik.
8. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Gratis (BPJS) di Puskesmas Mamasa Kabupaten Mamasa, berdasarkan teori Eduardo III pelaksanaan program kesehatan gratis termasuk media, Sumber daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi. Dari segi komunikasi sudah sangat baik dilihat dari hasil wawancara yang ada begitu pun dengan sumber daya, Disposisi, dan struktur birokrasi. Adapaun faktor yang mendukung yaitu :
9. Faktor Pendorong meliputi komitmen pimpinan politik, kemampuan

organisasi dan juga dukungan dari kelompok pelaksanaan. Dalam hal ini sudah sangat baik berdasarkan hasil yang didapat dari beberapa wawancara.

10. Faktor penghambat meliputi banyaknya pemain, terdapatnya komitmen atau loyalitas ganda, kerumitan yang melekat pada program itu sendiri dan jenjang pengambilan keputusan yang terlalu banyak. Adapun beberapa hal hali ini menjadi dari penelitian yang dilakukan tidak cukup kuat untuk menghambat kemajuan program BPJS.

SARAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan uraian Kesimpulan diatas, dapat direkomendasikan saran saran sebagai berikut :

1. Mewujudkan masyarakat yang bersih dan sehat serta fleksibilitas keuangan, optimalisasi pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Gratis (BPJS) sesuai dengan tujuan yang diinginkan dari tujuan, visi, misi dan biaya pengurusan dan stafnya.
2. Sebagai penyelenggara program jaminan kesehatan gratis, Puskesmas Mamasa (Medical Center) perlu lebih berkomitmen untuk memperkuat sosialisasi dan pendidikan kesehatan masyarakat serta memenuhi kewajibannya.\
3. Pemerhati, masalah kesehatan, lembaga swadaya masyarakat (LSM), organisasi kesehatan, organisasi pendidikan dan pemberdayaan, otoritas, pemangku kepentingan dan anggota industri anggota lainnya berperan dalam memastikan pemerataan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
4. Diharapkan Jika ada anggota masyarakat yang ingin berpartisipasi dengan baik dalam Program Kesehatan Gratis dan memiliki keluhan tentang Program Kesehatan Gratis (BPJS), mereka harus segera memberi tahu pengelola Puskesmas untuk mencari solusi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Khalik, 2017. Implementasi Kebijakan Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan di Kabupaten Mamuju. Polewali: Fisip Unasman
- Agustino. 2018. Dasar-Dasar Kebijakan pelayanan Publik. Bandung: Alfabeta
- Anselm dan Corbin, Juliet. 2017. pemerintah . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Budiman Imran, 2019. Kepuasan Pasien, Citra Rumah Sakit dan Kepercayaan Pasien di Provinsi Sulawesi Barat. trijurnal.lemlit.trisakti.ac.id
- Gulo, W. 2014. jaminan kesehatan. Jakarta: PT Grasindo. Islami
- Kadir. 2012:2. Tentang pengertian program implementasi kesehatan. yogyakarta
- Moleong, L. J. 2014. Metode penelitian kualitatif. Bandung: remaja Rosdakaria.

- Prastowo. A. 2012. Metodologi penelitian kualitatif dalam perspektif rancangan penelitian. Yogyakarta: Ar-ruzz Media
- Salim, Agus. 2016. Teori dan Paradigma kesehatan . Buku Sumber untuk Penelitian Kualitatif Ed. Kedua. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Syaukani dkk. 2014 : 295. Tentang implementasi risk manajemen. Yogyakarta
- Peraturan Bupati No 26 Tahun 2015 Tentang Tugas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 125/Menkes/SK/II/2008 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat
- Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2014, Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan.
- Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2014, Tentang penetapan penggunaan Dana Pelayanan Kesehatan Program Jaminan Kesehatan Nasional Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Sulawesi Barat